

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua

Agus Sunaryo*

* Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 02 Januari 2023

Disetujui 31 Januari 2023

Keywords:

Belanja Modal
Pendapatan Asli Daerah
PAD

ABSTRAK

Abstract : *This research aims to determine the effect of capital expenditure on increasing local revenue (PAD) in Papua Province. This research uses a quantitative approach with data sources from the Central Statistics Agency (BPS) and the Papua Province Regional Revenue Management Agency (BAPPENDA). Simple linear regression analysis technique and hypothesis testing using SPSS version 21. The results of the study revealed that the results of the t test found that capital expenditure had a positive but not significant effect on the Regional Original Income (PAD) of Papua Province.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data dari pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Provinsi Papua. Teknik analisis regresi linear sederhana dan pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hasil pada uji t didapati bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Agus Sunaryo

Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura,

Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua

E-Mail : agusunaryo093@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan di Provinsi Papua yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari Provinsi Papua yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Memperhatikan kecenderungan penerimaan PAD selama ini terlihat masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah.

Tabel 1 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 s/d 2019

N O	TAH UN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	HASIL PENGELOLAAN	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	PAD
1	2010	242.788	20.576	28.926	77.435	369.725
2	2011	252.434	21.171	30.340	84.892	388.837
3	2012	275.091	18.889	19.887	49.231	363.098
4	2013	453.677	24.524	25.793	129.732	633.726
5	2014	566.062	57.091	32.942	288.833	944.928
6	2015	633.391	49.059	15.932	218.888	917.270
7	2016	666.992	56.680	53.759	241.537	1.018.968
8	2017	761.840	65.581	721	221.857	1.049.999
9	2018	767.917	60.804	11.911	83.484	924.116
10	2019	669.939	41.604	53.580	172.931	938.054
JUMLAH		5.290.131	415.979	273.791	1.568.820	7.548.721

Sumber : BAPPENDA, 2020

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap tahunnya dari total PAD sejak tahun 2010-2019. Hal ini menggambarkan bahwa PAD Provinsi Papua mengalami pertumbuhan yang semakin baik pada 10 tahun terakhir meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2019.

Provinsi Papua juga merupakan salah satu daerah yang berupaya dalam meningkat realisasi belanja modalnya dengan tujuan untuk meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur. Belanja modal adalah bagian dari belanja langsung daerah yang digunakan untuk belanja barang dan jasa yang dapat menambah aset tetap atau kekayaan daerah yang manfaatnya melebihi satu periode anggaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Potensi belanja modal dalam peranannya untuk meningkatkan pelayanan publik seharusnya menjadi alasan pemerintah daerah menstruktur ulang anggaran belanja daerah, yaitu memperbanyak proporsi belanja modal dibanding belanja rutin.

Tabel 2 Proporsi Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Provinsi Papua Periode 2010-2019

NO	TAHUN	BELANJA MODAL	TOTAL BELANJA	PROPORSI (%)
1	2010	1.199.489.101	5.294.198.937	22,66
2	2011	1.404.550.459	5.650.474.891	24,86
3	2012	1.421.658.223	6.290.375.712	22,60
4	2013	1.421.658.223	6.290.375.712	22,60
5	2014	1.220.744.851	8.172.147.683	14,94
6	2015	4.562.248.919	10.303.786.846	44,28
7	2016	2.490.333.442	11.968.494.421	20,81
8	2017	3.530.217.100	15.083.876.704	23,40
9	2018	1.918.505.428	13.220.704.218	14,51
10	2019	2.811.607.953	13.928.117.822	20,19
JUMLAH		21.981.013.699	96.202.552.946	230,84

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2020

Belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Papua cenderung mengalami fluktuasi selama periode 2010-2019, Oleh karena itu, anggaran belanja daerah harus lebih dialokasikan untuk belanja modal dibandingkan untuk belanja rutin yang dianggap lebih konsumtif dan kurang produktif.

Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penulis dalam pembahasan masalah, maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan yaitu : “Apakah Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua?”

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Dewi dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Menurut Darise (2008 : 141), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat *multiplier effect* (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Rudy Badrudin (2011) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Halim (2004) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah berupa penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang dapat bersumber dari ebrbagai sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri dan dipungut dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di dalam daerah tersebut. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Kemudian menurut Saleh (2003) menyebutkan bahwa : pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif karena disajikan dalam bentuk angka-angka yang berupa laporan keuangan.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah dari Kantor Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pendapatan Daerah dimana mengambil data Daerah (PAD) dan Belanja Modal

Teknik Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian distribusi normal dilakukan dengan cara melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu kondisi dimana semua residual atau error mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari suatu pengamatan kepengamatan yang lain

b. Analisis Regresi

$$Y = a + bx$$

Dimana,

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

x = Belanja Modal

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2009).

d. Uji-t

Menurut Sugiyono (2004) untuk menguji variabel bebas secara satu persatu ada atau tidaknya pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Pengujian secara parsial (Uji t) digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dengan taraf signifikansi yang digunakan adalah 5% atau $\alpha = 0.05$. Langkah-langkahnya adalah :

a. Menari nilai t_{tabel} dengan cara menentukan tingkat kesalahan ($\alpha = \alpha$) dan menentukan derajat kebebasan (df)

b. Mencari nilai t_{hitung} dengan menggunakan bantuan aplikasi *SPSS 21 for Windows*

c. Menentukan kriteria keputusan:

1) H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau H_0 diterima jika signifikansi $t > \alpha$

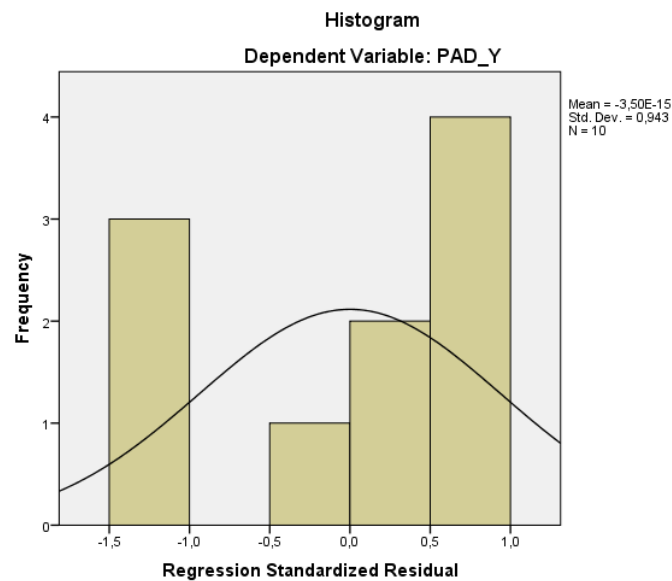
2) H_a diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau H_a diterima jika signifikansi $t < \alpha$. (Sugiyono, 2008).

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

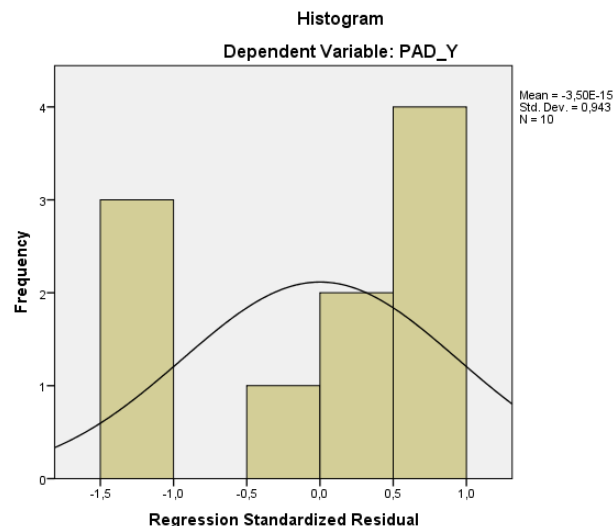
Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian distribusi normal dilakukan dengan cara melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berikut data Uji Normalitas :



Berdasarkan hasil tampilan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonalnya. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu kondisi dimana semua residual atau error mempunyai varian yang tidak konstan atau berubah-ubah. Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari suatu pengamatan kepengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode analisis grafik *Scatterplot*. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:



Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak untuk dipakai menjadi alat prediksi.

Hasil Analisis Regresi

Berdasarkan dengan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 21.0 *for windows*, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Regersi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,120	,695		8,812	,000
BelanjaModal_X	,207	,515	,141	2,402	,698

a. Dependent Variable: PAD_Y

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,120 + 0,207X_1 + e_i$$

Persamaan di atas memberikan implementasi bahwa:

- Konstanta sebesar 6,120; artinya jika Belanja Modal (X_1) nilainya adalah 0, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) mengalami peningkatan sebesar 6,120.
- Koefisien regresi variabel Belanja Modal (X_1) sebesar 0,207; artinya jika variabel Belanja Modal (X_1) mengalami kenaikan 1 satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,207. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara belanja modal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji Hipotesis

Pengaruh belanja modal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil analisis diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,402 nilai sig (p signifikan) sebesar 0.689. Dengan demikian nilai sig (p signifikan) $0,689 > 0,05$ (alpha yang dipersyaratkan) maka Belanja modal berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini didukung oleh teori sebelumnya. Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat dijelaskan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan nilai t hitung sebesar 2,402 dan nilai signifikansi sebesar 0.698. Alokasi belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang ekonomi ternyata menunjukkan pengaruh yang berarti bagi PAD namun kurang maksimal, kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk pengeluaran belanja modal menunjukkan bahwa total belanja modal Provinsi Papua pada tahun 2010-2019 mengalami fluktuatif dan tidak meningkat signifikan sehingga belanja modal belum maksimal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada sehingga dampak dari anggaran belanja modal terhadap PAD tidak maksimal. Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil pada uji t didapati bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Rudy. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin Ekonomi, Volume 9 Nomor 1. ISSN 1410-2293. Yogyakarta.
- Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). PT. Indeks. Jakarta.

- Erlina, Rasdianto, 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Medan: Brama Ardian.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS,. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Vol.100-125. Semarang.
- Halim, Abdul & Kusufi, Syam. 2014. Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Samsubar, Saleh. 2003. "Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia", Vol. XIV No. 2 Desember 2003, Semarang, Media Ekonomi & Bisnis.
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. CV. Alfabeta. Bandung.